

Implementasi Kebijakan Organisasi PGRI dalam Mengembangkan Profesionalisme Guru Di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Lilik Yuniastutik

Guru SDN Sitirejo 02 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Email: yeey.yenny@gmail.com

Abstract: In this research, the approach that used is description qualitative approach. The method is observation, interview, and documentation. This research shows about: 1) the policy foundation of PGRI organization, 2) the function of PGRI Cabang Wagir as the gathering place for teachers and the other education people. PGRI is the struggle organization, the profession organization and manpower organization. It's foundation is Pancasila, the characteristic are unitaristic, independent, and non politic party. 3) The efforts of PGRI to develop the teacher's professionalism. It has many programs. They are general, organization and cadre area; profession and education area; manpower and prosperity area; religion education area; womanpower area; free school education, the beginning education and young generation area; sports and art area; advocation and law area; and the finance area.

Keywords: profession organization, professionalism

Abstrak: Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan tentang: 1) Dasar kebijakan organisasi PGRI cabang Wagir 2) Fungsi dan peran PGRI cabang Wagir sebagai tempat terhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis, 3) upaya yang dilakukan PGRI dalam mengembangkan profesionalisme guru antara lain dengan adanya program-program yang dibagi dalam beberapa bidang (bidang umum, organisasi, dan kaderisasi, bidang profesi dan pendidikan, bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan, bidang pendidikan agama, bidang pemberdayaan perempuan, bidang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan generasi muda, bidang olah raga dan seni budaya, bidang advokasi dan hukum, bidang keuangan).

Kata kunci: organisasi profesi, profesionalisme

1. Pendahuluan

Beban tugas guru pada saat ini semakin berat, terutama jika dibandingkan sebelum adanya Undang-undang Guru dan Dosen. Guru bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No 14 Tahun 2005 Pasal 1).

Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru adalah melalui organisasi profesi guru. Dalam UU Guru dan Dosen Pasal 41 ayat 2 disebutkan, organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam profesi keguruan, profesi guru memiliki ikatan kesejawatan, kode etik profesi, dan organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur yang berkaitan dengan keprofesian (UU Guru dan Dosen Ps.42). PGRI adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme, memperjuangkan perlindungan hukum, dan perlindungan keselamatan kerja serta menghimpun dan menyalurkan inspirasi anggotanya. PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya.

PGRI mempunyai peranan strategis dalam reformasi pendidikan nasional kepada anggotanya. PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan. Menurut UU Guru dan Dosen Bab III, Pasal 7. Dari uraian tersebut di atas seseorang yang berprofesi sebagai guru diharapkan menjadi anggota organisasi profesi PGRI yang merupakan wadah/tempat dalam mendukung tugas dan profesi sebagai guru.

PGRI Cabang Wagir yang merupakan salah satu organisasi profesi bagi guru yang ada di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Melalui penelitian ini diharapkan banyak guru mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Organisasi Profesi PGRI Cabang Wagir dan apa saja yang telah/sedang/akan dilakukan, sudah sesuaikah dengan apa yang tertulis dalam UU Guru dan Dosen terutama Ps. 41-44 tentang organisasi profesi guru.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, dan persepsi seseorang atau kelompok (Sukmadinata, 2006). Lebih lanjut menurut Moleong dalam (Suparmi, 2009), karakteristik penelitian kualitatif adalah: 1) berlatar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, 2) peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama, 3) analisis data secara induktif, 4) bersifat deskriptif, 5) lebih mementingkan proses daripada hasil.

Jenis penelitian adalah penelitian kebijakan. Dengan mengacu pada pemikiran dari Patton dan Sawicki (1986: 3), Majchrzak (1984: 12), Danim (2000: 23), dan Nugroho (2008: 530), yang dimaksud penelitian kebijakan adalah prosedur penelitian ilmiah yang berusaha memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu kebijakan, yang hasil-hasilnya dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi yang berorientasi-tindakan praktis terkait dengan kebijakan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dilakukan guna memperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Organisasi profesi PGRI dalam mengembangkan profesionalisme guru di Kecamatan Wagir kabupaten malang.

Penelitian ini dilaksanakan pada sebuah organisasi profesi guru yaitu PGRI Cabang, yang berlokasi di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Alasan peneliti mengangkat PGRI Cabang Wagir yang merupakan salah satu organisasi profesi bagi guru yang ada di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Sebagai organisasi profesi PGRI harus selalu aktif mensosialisasikan program-program apa saja yang telah/belum dilakukan terhadap anggota. Dengan harapan semua anggota akan mengetahui dan mengerti bahkan melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh PGRI, terutama di Kecamatan Wagir kabupaten Malang.

3. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dengan cara menggali sumber data baik primer maupun skunder untuk memperoleh data yang meliputi: Dasar Kebijakan Organisasi PGRI Cabang Wagir, Peran Organisasi Profesi PGRI Cabang Wagir, dan Upaya yang dilakukan PGRI Cabang Wagir dalam mengembangkan profesionalisme guru. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sebagai organisasi profesi, PGRI memiliki dasar kebijakan. Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam. Namun secara umum kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah-masalah yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas (Tangkilisan, 2000:3) dalam (Kresno, Agus, 2010)

Menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones (dalam Meyer, 1984:66), dikatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kebijakan (policy) dimaknai sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah,

menurut Harold D. Lasswell dalam Irfan Islami (2003:15). Konsep senada juga diungkapkan oleh Carl J. Friedrich dalam (Kresno, Agus, 2010) bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu, sedangkan menurut Dye (dalam Cooper, 2004:3) "*policy as whatever governments choose to do or not to do*" (Kebijakan merupakan keputusan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui dokumen yang dimiliki organisasi PGRI, bahwa dasar kebijakan organisasi PGRI yang digunakan sebagai landasan Organisasi PGRI dalam pelaksanaan segala tugas, peran, dan fungsinya adalah menggunakan Hasil Keputusan Konggres XX PGRI tahun 2008, yang didalam pelaksanaannya mempertimbangkan UU RI No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kepres RI No 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Menurut hasil Konferensi Cabang PGRI Kecamatan Wagir mencantumkan Rancangan Program Kerja yang didalamnya mencantumkan landasan organisasi PGRI adalah: (1) Idiil: Pancasila; (2) Konstitusional: UUD 1945; (3) Yuridis Formal: UU No 20 tahun 2003; (4) Operasional: Keputusan Konggres PGRI XX tentang AD/ART PGRI.

Menurut Anggaran Dasar PGRI hasil Kongres XX tahun 2008 Bab III Pasal 3 menyebutkan PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan.

Peran PGRI Cabang Wagir sebagai organisasi profesi bagi guru adalah sebagai berikut: Mendorong anggota (guru) untuk meningkatkan kualitas kerja untuk menjadi guru yang profesional; Mengikutsertakan tenaga pendidik/kependidikan untuk mengikuti seminar, lokakarya, workshop, KKG dan sebagainya, untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik; Memotivasi guru agar meningkatkan kualifikasi akademik (menempuh pendidikan S1 atau S2); Berusaha ikut terlibat aktif dalam promosi dan pengembangan karier anggota; Membantu anggota Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri untuk mendapat SK GTT dari pemerintah daerah, sebagai modal mendapatkan kesempatan mengikuti sertifikasi; Memantau dan mengendalikan iuran/pungutan yang penggunaannya tidak jelas, contoh: waktu pemberkasan sertifikasi, pencairan sertifikasi (TPP), dan pembelian karcis untuk menonton sepak bola; Mendorong anggota (Guru dan Kepala Sekolah) untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi dan informasi (IT); Memperjuangkan guru-guru yang usianya sudah 55 tahun untuk diikutkan sertifikasi walaupun belum memiliki ijazah S1.

Untuk mengembangkan profesionalisme guru PGRI Cabang Wagir mempunyai program-program, baik yang dalam perencanaan, sedang maupun sudah dilaksanakan, serta tindak lanjut terhadap program-program yang sudah/belum terlaksana. Gambaran program-program tersebut adalah:

- 1) Program-program yang akan dilaksanakan PGRI tahun 2011-2015: Bidang Umum, Organisasi dan Kaderisasi, antara lain; Bidang Profesi dan Pendidikan; .Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan; Bidang pendidikan agama; Bidang pemberdayaan perempuan; Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, dan Generasi Muda; Bidang Olah Raga dan seni Budaya; Bidang advokasi dan hukum; Bidang keuangan.
- 2) Program-program yang sedang dilaksanakan PGRI Cabang Wagir saat ini antara lain: Konsolidasi di tingkat cabang dan reorganisasi tingkat ranting pada semua jenjang sekolah negeri maupun swasta (tingkat PAUD s/d SMP), sudah terbentuk ranting-ranting; Pengadaan KTA PGRI dari jenjang PAUD s/d SMP; Mengajak tenaga pendidik dari jenjang PAUD s/d SMP, untuk menjadi anggota PGRI (jumlah anggota PGRI dari 238 menjadi 605 orang); Menjalin kerjasama antar lembaga pendidikan mulai dari PAUD s/d SMP (contoh tempat kegiatan tertentu berpindah-pindah); Memperjuangkan guru yang mendekati purna tugas untuk diikutkan sertifikasi tanpa melihat ijazah; Ikut aktif dalam promosi guru yang berkarier untuk menduduki suatu jabatan; Ikut aktif dalam mempertimbangkan penempatan pejabat di lingkungan UPTD Wagir; Melaksanakan kegiatan seni dan budaya, antara lain: karawitan, campur sari, paduan suara, seni tari; Pengendalian terhadap pungutan-pungutan yang penggunaannya tidak jelas.
- 3) Program-program yang sudah dilaksanakan PGRI Cabang Wagir, antara lain: Konsolidasi di tingkat cabang sampai ranting; Menertibkan data anggota dan pengadaan KTA; Menjalin

kerjasama antar lembaga pendidikan dan instansi sektoral; Memperjuangkan anggota yang semestinya ikut sertifikasi; PORGU (Pekan Olah Raga Guru); Memperjuangkan GTT untuk mendapat SK dari pemerintah daerah

- 4) Program-program yang belum dilaksanakan PGRI Cabang Wagir, antara lain: Pembangunan kantor; Seminar, lokakarya, workshop; Membantu cara pembuatan karya tulis; Pengurusan SK berkala; Memberi tali asih kepada guru/kepala sekolah yang purna tugas; Penghargaan kepada guru yang berprestasi; POR PGRI (waktunya belum ditetapkan); Bidang Advokasi dan Hukum, dan sebagainya. Kendalanya adalah kepengurusannya baru berjalan satu tahun; anggaran yang masih jauh dari mencukupi; belum ada solusi cara penggalan dana; sosialisasi program kepada anggota belum maksimal; kurang pro aktif antara pengurus dan anggota, apabila ada permasalahan.
- 5) Cara menindak lanjuti program yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana, antara lain: Yang sedang terlaksana tetap dijalankan secara aktif; berusaha menggali dana diluar iuran rutin; mengefektifkan sosialisasi program sampai ke ranting-ranting.

4. Pembahasan

Konsep dan kebijakan organisasi PGRI telah diimplementasikan melalui peran dan upaya yang dilakukan PGRI Cabang Wagir melalui program-program yang telah dicanangkan, baik program yang masih direncanakan, sedang dilaksanakan, sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Hal tersebut akan dijelaskan pada pembahasan fokus masalah selanjutnya.

Fungsi dan Peran PGRI Cabang Wagir sebagai tempat terhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional.

PGRI Cabang Wagir beserta seluruh anggotanya secara terus menerus berupaya mewujudkan pengabdianya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PGRI bertugas membina serta mengembangkan sikap, perilaku, dan keahlian agar para guru anggota PGRI mampu melakukan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, dan dapat diharapkan serta dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. Guru anggota PGRI tidak hanya mengajar kompetensi dasar kepada anak didik, akan tetapi juga bertanggung jawab atas pembentukan karakter untuk anak didik agar menjadi sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, berilmu, berwatak mulia, bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab.

Guru yang bermutu dan bertanggung jawab merupakan pilar utama untuk mencapai keberhasilan pendidikan, yang pada gilirannya hasil dari didikannya akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, kebulatan tekad, jiwa dan semangat kejuangan, kesetiakawanan sosial dan organisasi, peningkatan mutu dan kemampuan profesional, dan ditingkatkan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam mengembangkan profesionalisme guru PGRI mempunyai program-program yang dibagi dalam beberapa bidang. Bidang-bidang itu antara lain: a) Bidang Umum, Organisasi, dan Kaderisasi, b) Bidang Profesi dan Pendidikan, c) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, d) Bidang Pendidikan Agama, e) Bidang Pemberdayaan Perempuan, f) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Generasi Muda, g) Bidang Olah Raga dan Seni Budaya, h) Bidang Advokasi dan Hukum, i) Bidang Keuangan.

Dalam setiap bidang mempunyai beberapa program yang tentunya harus tuntas dan terlaksana dalam kurun waktu lima tahun masa bakti kepengurusan PGRI. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut tak jarang terjadi masalah-masalah dalam beberapa program yang sudah dicanangkan. Hal tersebut diatasi dengan musyawarah melalui rapat kerja yang diadakan minimal satu kali dalam setahun. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan PGRI tersebut dapat menuntaskan semua program-program yang telah dicanangkan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi

termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme guru di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Pengakuan masyarakat dan pemerintah atas eksistensi PGRI sebagai organisasi profesi akan mempermudah dan memperlancar PGRI dalam menjalankan tugas dan perannya, dan sebagai penyemangat bagi para pengurus PGRI. Sesuai dengan PGRI sebagai organisasi yang bersifat unitaristik, independent dan non politik. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi program-program yang telah dicanangkan PGRI akan bisa teratasi, salah satu contohnya kurangnya sarana dan prasarana yang saat ini masih belum bisa terpenuhi, dengan dukungan anggota yang besar, mungkin akan segera dapat teratasi.

5. Simpulan

Dasar Kebijakan organisasi PGRI Cabang Wagir didalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan adalah pada Hasil Konggres XX tahun 2008, dimana didalamnya menimbang antara lain Undang-Undang RI Nomer 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; UU RI Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU RI Nomer 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Keputusan Presiden Nomer 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional, ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomer 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi.

Fungsi dan peran PGRI Cabang Wagir sebagai organisasi profesi telah menerapkan amanat dari Hasil Konggres, Undang-Undang RI dan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar kebijakan dari pelaksanaan organisasi, terutama dalam tugas memberikan semangat dan dorongan pada para guru dalam mengembangkan kualitas kerja untuk menjadi guru yang profesional dalam tugas serta memberikan motivasi pada guru untuk selalu mengembangkan kariernya guna kemajuan di dunia pendidikan. Guru merupakan ujuk tombak dalam mencerdaskan anak bangsa. Dengan adanya guru-guru yang profesional, kualitas pendidikan di negara ini akan bisa dipertanggungjawabkan.

Upaya PGRI Cabang Wagir dalam mengembangkan profesionalisme guru yaitu PGRI mempunyai program-program yang dibagi dalam beberapa bidang. Bidang-bidang itu antara lain: a) Bidang Umum, Organisasi, dan Kaderisasi, b) Bidang Profesi dan Pendidikan, c) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, d) Bidang Pendidikan Agama, e) Bidang Pemberdayaan Perempuan, f) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Generasi Muda, g) Bidang Olah Raga dan Seni Budaya, h) Bidang Advokasi dan Hukum, i) Bidang Keuangan. Setiap bidang merumuskan program-program yang tentunya mempunyai tujuan dalam pengembangan profesi guru.

6. Saran

Bagi PGRI Cabang Wagir yang mempunyai peran besar bagi guru, hendaklah selalu meningkatkan jatidirinya sebagai organisasi perjuangan. Organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan. Lebih meningkatkan kerjasama yang baik dengan pihak terkait, seperti PGRI di tingkat di atasnya, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah sampai pusat. Diharapkan akan lebih mudah bagi PGRI Cabang Wagir untuk memperjuangkan dan mewujudkan semua aspirasi anggota guna terwujudnya visi, misi, dan tujuan PGRI.

Menerapkan peran-peran tersebut untuk mengembangkan profesionalisme guru dengan tetap mengacu pada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang wewenang organisasi profesi dan guru.

Dalam merumuskan program-program PGRI Cabang Wagir untuk masa bakti 5 tahunan, hendaklah selalu mensosialisasikan kepada anggota. Harapannya, semua anggota akan mengetahui program-program yang sedang dalam rencana, yang sedang, dan yang akan dilaksanakan terutama yang berhubungan dengan pengembangan profesionalisme guru. Dengan mengetahui sepak terjang yang dilakukan PGRI Cabang, harapannya para guru akan dapat memberikan dukungannya terhadap semua program-program tersebut. PGRI Cabang Wagir diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan program-program yang sudah baik dan terus memperjuangkan yang belum dapat terlaksana karena berbagai macam kendala.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2002), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashkanasy, Celeste P.M. Wilderom, dan Mark F. Peterson (eds), *Handbook of Organizational Culture and Climate*. California: Sage.
- Barnard, C.I, (1968), *The Functions of Executive*, Cambridge: Harvard University Press
- Basumi dalam Soetjipto, (2009), *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Blonger, O. (2010). *Sejarah Singkat Lahir PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)*, Diakses 25 November 2010, dari <http://www.kaskus.us/showthread.php?=&6050131>
- Bungin, Burhan. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press
- Danim, S. (2000). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- DEDs MaDe Blogs, (2011), *Peran PGRI dalam Memperjuangkan Nasib Guru dan Meningkatkan Profesionalisme Guru*, Diakses 22 Januari 2012, <http://dedsmade.blogspot.com/2011/01/makalah-tentang-peran-pgri->
- Dunsire, A. (1973). *Administration : The Word and the Science*. Oxford : Martin Robertson.
- Gerloff, E. A. (1985). *Organizational Theory and Design : A Strategic Approach For Management*. Singapura : McGraw-Hill.
- Hermawan, S.R. (1989), *Etika Keguruan. Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Guru Indonesia*, Jakarta: PT Margi Hayu.
- Hicks, Herbert G and Gullett C. Ray, (1976), *The Management of Organization*, New York: MacGraw-Hill Company.
- Ikatan Konselor Indonesia, (2008), dalam Akhmad Sudrajad, *Menanti Peran Aktif Organisasi Profesi*, diakses 8 Maret 2009 dari <http://akhmadsudrajad.wordpress.com/author/akhmadsudrajad/>
- Kresno, Agus, (2010), *Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: UMM
- Kusdi, (2009), *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Majchrzak, A. (1984). *Methods for Policy Research*. Beverly Hills – London – New Dehli: Sage Publications.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pers)
- Mills, J.C.H., dan Mills, A.J., (2000), “Rules, Sensemaking, Formative Contexts, and Discourse in the Gendering of Organizational Culture” dalam Neal M.
- Moleong, Lexy, (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, (2007), *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Rosda
- Neuman, W. Lawrence, (2000), *Social Research Method*, New York: Allyn and Bacon
- Nugroho, Hery (2009), *Mengoptimalkan Organisasi Profesi*, Agupena, Jawa tengah diakses 12 Agustus 2009.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ornstein, Allanc., dan Levine, DanielU., (1984), *An Introduction to the Foundations of Education. Third Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Patton, C. V. dan Sawicki, D. S. (1986). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice Hall
- Sagala, Syaiful (2009), *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2007), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih, (2006), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suparmi, (2011), *Teses Analisis Kebijakan Rintisan Sekolah Standar Nasional di SDN Balerejo 01 Kabupaten Madiun*, Malang: UMM

- Syaefudin, U. (2009), *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen* (2006), Bandung, Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* (2003), Bandung, Citra Umbara.
- Wahab, Abdul A., (2008), *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta.